

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Upaya pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Hal ini tercantum dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang diperkuat dengan PP No 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang menyatakan bahwa dalam suatu pelaporan keuangan harus disertakan informasi mengenai kinerja instansi pemerintahan.

Penilaian kinerja pada instansi pemerintah sangatlah penting dilakukan, hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penilaian kinerja tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja sebuah organisasi publik. Dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, kinerja instansi pemerintah bukan untuk mencari laba (*profit oriented*), tetapi lebih mengutamakan pelayanan publik (*service public oriented*). Selain itu penilaian kinerja pada organisasi publik digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pada periode yang lalu, untuk digunakan sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan selanjutnya (Aisyah, dkk 2014).

Penyusunan berbagai macam strategi dalam kinerja pemerintahan dimulai dari tahap perencanaan yang dilanjutkan dengan pembangunan, pengembangan, pengendalian, dan pengevaluasian sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan serta memberdayakan potensi kinerja yang dimiliki daerah tersebut. Selain itu, sebuah pencapaian pelaksanaan sebuah kegiatan maupun program yang ada dalam pemerintahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dengan perwujudan berbagai sasaran serta tujuan untuk menjadikan kinerja pemerintahan lebih terstruktur (Bambang dan Pratolo, 2007). Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan suatu kinerja pemerintahan sesuai dengan tujuan pemerintah yang akan dicapai.

Hal ini sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional yang mana menjelaskan bahwa satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai unsur penyelenggara ditingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut mengajak kita untuk turun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Sesuai dengan konsep Islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah dan penegak keadilan yang diberikan untuk seorang pemimpin tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa [4]: 135 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak dan kerabatmu. Jika (dia yang terdakwa) kaya atau miskin maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan”. (Q.S.An-Nisaa : 135).

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai salah satu organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut memiliki kinerja yang berorientasi atas kepentingan rakyat untuk mendorong pemerintah tanggap dalam menyikapi kondisi lingkungan daerah yang ada. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang diamanatkan rakyat, pemerintah harus memiliki rencana kedepannya guna memperoleh tujuan yang jelas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerja secara professional melalui pelayanan yang baik, jujur, adil transparan dan

berkualitas. Semakin berkualitas pelayanannya maka akan berdampak baik terhadap kinerja serta kualitas pemerintahan kedepannya.

Hubungan yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah adalah saling percaya. Hal ini sesuai dengan kemampuan manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan kaya akan integritas serta kejujuran (Produg, 2011). Masyarakat selaku pemberi sebuah amanah memberikan amanah sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada pemimpin melalui bentuk pertanggungjawaban akan kinerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dibuat untuk perwujudan akan kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk mencapai kinerja yang baik dalam pemerintahan maupun organisasi, tentunya ada faktor pendukung didalamnya, yang pertama adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat bukan hanya pada tindakan namun juga kegiatan pimpinan beserta seluruh karyawan. Hal ini dirancang untuk memberikan sebuah keyakinan akan kinerja pemerintah yang memadai guna mencapai sebuah sasarannya. Mekanisme sistem pengendalian internal ada 4 unsur menurut, Mulyadi (2008) yaitu: Struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur, praktik organisasi, dan karyawan. Sistem pengendalian internal merupakan proses integral dalam sebuah tindakan yang dilakukan secara

berkelanjutan oleh pimpinan untuk memberikan keyakinan tercapainya organisasi. Menurut Agung (2008) sistem pengendalian intern mengisyaratkan bahwa tidak hanya kebijakan atas prosedur yang dirancang tetapi juga memberikan keyakinan akan kinerja pemerintah yang memadai bagi manajemen serta organisasi guna mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam hal ini jika suatu sistem pengendalian internal tersebut efektif dan memiliki pengaruh yang baik maka kinerja pemerintahan yang terjalin juga akan sangat berpengaruh baik pula.

Selain faktor sistem pengendalian internal, ada faktor gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan kelembagaan pemerintahan dan unsur pemimpin beserta karyawan daerah harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jika kelembagaan dan pemimpin dan karyawan tidak diikutsertakan maka akan menimbulkan konflik. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kinerja dalam pemerintahan (Thoah, 2010). Menurut Hidayat dkk. (2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku seorang pemimpin yang digunakan untuk menunjukkan hubungan hubungan antara pimpinan dan bawahan untuk mempengaruhi bawahannya dalam bertindak agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Hambleton dan Sweeting (2004) mengemukakan bahwa menurut Undang-Undang Tahun 2000 di Inggris, sebagai pemisahan kekuasaan eksekutif dan majelis politik sesuai gaya kepemimpinan memiliki tiga manfaat, yaitu eksekutif memiliki legitimasi

bersikap lebih berani, pemisahan kekuasaan semakin jelas, dan meningkatkan akuntabilitas dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya pemisahan tersebut menjadikan setiap pemimpin dapat memiliki karakteristik masing-masing dalam menjalankan tugasnya guna pencapaian sebuah tujuan organisasi. Faktor kepemimpinan ini memiliki pengaruh terhadap strategi organisasi yaitu pada saat merencanakan (membuat kebijakan dan mengambil sebuah keputusan), implementasi, dan evaluasi. Dengan demikian, gaya kepemimpinan dijadikan sebuah pedoman seorang pemimpin dalam peningkatan kinerja. Adanya gaya kepemimpinan sangat memberi dampak besar bagi sebuah kinerja pemerintah, hal yang paling mendasar adalah jika suatu gaya kepemimpinan dalam pemerintahan memiliki pengaruh yang baik maka sebuah kinerja yang ada didalamnya juga akan berdampak baik bagi pemerintahannya.

Selain gaya kepemimpinan, keberhasilan suatu kinerja organisasi pemerintah juga tergantung pada budaya organisasi yang ada didalamnya. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang besar dalam unsur pemerintahan. Hal ini menjadikan sebuah nilai, norma, sikap dalam sebuah organisasi sebagai tolak ukur pemimpin dalam pemerintah. Jika pemimpin tidak diberikan acuan mengenai budaya organisasi seseorang maka akan menimbulkan konflik. Pada dasarnya sebuah budaya organisasi merupakan kerangka kerja sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan karyawan untuk mengarahkan tindakan dalam pencapaian sebuah organisasi (Robbins, 2007).

Robert dan Kinicki (2003) mengungkapkan budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku pemberi pelayanan masyarakat apabila dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan dengan waktu yang cukup maka masyarakat akan puas, demikian pada prinsipnya budaya organisasi pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik. Cahyana dan Jati (2017) menyatakan budaya organisasi merupakan suatu asumsi yang dijadikan sebuah tolak ukur kesesuaian tujuan organisasi, strategi dan dampak yang dihasilkan. Aisyah dkk. (2014) berpendapat bahwa sebuah budaya dapat dijadikan acuan perilaku seseorang dalam sebuah organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau kinerja yang ditetapkan. Dengan demikian budaya organisasi, tidak mengherankan jika suatu anggotanya adalah orang-orang baik dan berkualitas pula. Fungsi dari budaya organisasi adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja agar dapat terpelihara dengan baik dan mendapatkan kinerja yang berkualitas. Adanya suatu budaya organisasi akan mempengaruhi suatu kinerja pemerintah. Jika suatu budaya organisasinya baik maka kinerja dalam pemerintahan akan memiliki nilai yang baik.

Faktor lain yang mendorong sebuah kinerja pemerintah adalah dengan adanya suatu komitmen organisasi. Komitmen organisasi ialah suatu dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sebuah tindakan yang mana

memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan seseorang. Hal ini menjadikan sebuah komitmen organisasi harus diikutsertakan dalam hal penilaian kinerja sebuah pemerintahan. Komitmen organisasi mencerminkan sebuah dimensi perilaku seseorang yang digunakan untuk menilai loyalitas karyawan terhadap sebuah perusahaan (Mowday, 1979). Menurut Isma (2004) komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam individu untuk melakukan sesuatu yang dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan untuk mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Lubis (2011) mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu tingkatan yang mana mengenai seseorang karyawan memihak pada sebuah organisasi dengan tujuan untuk mempertahankan keanggotannya dalam sebuah organisasi. Suatu komitmen organisasi memiliki pengaruh dalam pemerintahan, jika komitmen organisasi dalam pemerintahan tersebut terrealisasi dengan baik maka sebuah kinerja pemerintahannya akan memiliki dampak baik.

Disamping itu, keberhasilan suatu organisasi khususnya pemerintahan tidak terlepas dari penerapan *good government governance*. Secara umum masyarakat di Indonesia menginginkan tata kelola keuangan berjalan dengan baik, bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang memiliki sifat dan pemahaman akan *good government governance* secara keseluruhan dapat mempengaruhi kinerja serta profesionalitasnya. Dalam

pemahaman ini dapat menghindarkan terjadinya (KKN) korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan akhir sesuai dengan harapan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang baik (Amelia, dkk 2014). *Good government governance* merupakan penyelenggaraan, oleh karena itu hal ini menjadi sangat penting agar masyarakat mempunyai akses untuk memperoleh informasi terkait tata kelola pemerintahan sehingga menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat akan pemerintahan semakin tinggi. *Good governance government* mengisyaratkan bahwa tidak hanya sistem pemerintahan sebagai suatu kegiatan, namun mengandung arti pengarahan, pembinaan, dan pengurusan yang dapat diartikan sebagai pemerintahan (Aisyah, dkk 2014). Menurut Pratolo dan Bambang (2017) *good government governance* adalah suatu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dan pencegahan korupsi. Saat ini telah banyak dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Magelang dalam perwujudan *good government governance*. Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri berupaya penuh agar daerahnya dapat menerapkan prinsip *good government governance* dengan baik. Bila suatu pemerintahan memiliki *good government governance* yang baik, maka kinerja yang ada didalam pemerintahan akan menjadi baik pula.

Seperti fenomena yang terjadi pada Kabupaten Magelang mengenai realisasi anggaran yang diperoleh informasi dari (LKjIP) laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang tahun 2017.

Tabel: 1.1
Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang
Tahun 2017

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	%
1	Retribusi jasa usaha	7.300.000.000	5.913.031.810	1.386.968.190	81,00%
2	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
	jumlah	7.300.000.000	5.913.031.810	1.386.968.190	81,00%
	Capaian tahun 2016	5.048.719.731	4.578.979.700	469.740.031	90.87%
	selisih	2.251.280.269	1.337.052.110	914.228.159	59.30%

Sumber:<http://lkjipdisparbud.magelangkab.go.id>

Berdasarkan tabel diatas terlihat capaian pendapatan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak Rp. 914.228.159 dan masih dibawah target yang telah ditentukan, sehingga target pendapatan tahun 2017 mengalami penurunan Rp. 5.913.031.810 (81.00%). Dalam hal ini realisasi anggaran yang mengalami penurunan dapat mempengaruhi kinerja yang ada pada SKPD Kabupaten tersebut, terutama pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Selain itu pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang, terdapat juga realisasi anggaran yang belum tercapai. Menurut informasi dari Rendika Ferry (2019) pemerintah Kabupaten Magelang gagal mencapai realisasi anggaran. Realisasi anggaran bulan Agustus 2019 baru mencapai 21% dan realisasi fisik 45,57% capaian ini masih rendah jika dibandingkan bulan lalu pada bulan Agustus 2018. Realisasi anggaran 21% dan realisasi fisik 45,57% capaian ini belum memenuhi target dari total anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang tahun 2019 sebesar Rp. 958.382.972.631 untuk membiayai 1.921 kegiatan. Namun hingga akhir Agustus 2019, realisasi anggaran baru terserap sebesar 21% dari target 65,26%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang belum mencapai target.

Beberapa peneliti terdahulu menjelaskan mengenai kinerja pemerintah daerah dan beberapa faktor-faktor didalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) meneliti tentang pengaruh *good governance*, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah survey pada SKPD Kota Pariaman. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa *good governance*, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hasnani (2016) menguji tentang pengaruh komitmen organisasi, pengawasan fungsional, dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah survey pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil dari penelitian

tersebut menunjukkan bahwa pengaruh komitmen organisasi, pengawasan fungsional, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2017) meneliti tentang pengaruh *good governance*, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah. Survey pada SKPD Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian *good governance*, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufarrohah (2013) meneliti tentang pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan kompetensi terhadap kinerja pemerintah daerah survey pada SKPD Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amelia dkk. (2014) meneliti tentang pengaruh *good governance government*, pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah survey pada SKPD Kabupaten Pelalawan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan jika *good governance government* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap

kinerja pemerintah daerah, sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) yang meneliti pengaruh *good governance*, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menambahkan variabel budaya organisasi. Selain perbedaan variabel, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD Kota Pariaman, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Magelang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” (Studi Survey Pada Seluruh SKPD di Kabupaten Magelang).**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan agar penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini di dukung dengan latar belakang masalah dan dukungan daftar pustaka sehingga dapat menghasilkan penelitian yang sesuai harapan. Selanjutnya batasan masalah juga digunakan lima variabel independen diantaranya sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan,

komitmen organisasi, budaya organisasi, dan *good governance government* serta satu variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah. Adapun batasan penelitian, sebagai berikut:

- a. Objek penelitiannya Seluruh SKPD yang terdiri dari badan, lembaga dan inspektorat yang ada di Kabupaten Magelang berjumlah 20 SKPD.
- b. Sistem Pengendalian Intern terbagi menjadi 5 menurut Peraturan Perundangan Nomor 60 Tahun 2008 yaitu: Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.
- c. Gaya Kepemimpinan, menurut teori Thoha (2010) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kinerja dalam pemerintahan. Ada 3 hal yang mendasari gaya kepemimpinan (Hasibuhan, 2007) yaitu: kepemimpinan otoriter, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan delegatif.
- d. Budaya Organisasi, menurut teori Aisyah dkk. (2014) sebuah budaya dapat dijadikan acuan perilaku seseorang dalam sebuah organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau kinerja yang ditetapkan. Menurut Wisnu dan Pradana (2014) terdapat 4 indikator yang berpengaruh terhadap budaya organisasi, yaitu: kedisiplinan, ketepatan, ketanggapan, komunikasi.
- e. Komitmen Organisasi, menurut teori Mowday (1979) komitmen organisasi mencerminkan sebuah dimensi perilaku seseorang yang digunakan untuk menilai loyalitas karyawan terhadap sebuah perusahaan. Terdapat 3 cara yang mendorong

sebuah komitmen organisasi menurut (Mowday dalam Sabrina, 2011) yaitu: identifikasi (*identification*), keterlibatan (*involvement*), dan loyalitas (*loyalty*).

- f. *Good Government Governance*, menurut Aisyah dkk. (2014) terbagi menjadi 4 prinsip yang mendasarinya yaitu: Akuntabilitas, *Responsibility* (Pertanggungjawaban), Transparansi, dan *Fairness* (Keadilan).
- g. Kinerja Pemerintahan, menurut teori Pratolo dan Jatmiko (2017) merupakan sebagai suatu pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan dan gambaran dari seberapa tingkat pencapaian yang dihasilkan dari pelaksanaan tersebut guna terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan daerah. Mahsun (2006) mengungkapkan bahwa terdapat 5 indikator penting dalam sebuah kinerja, yaitu: indikator masukan, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat, dan indikator dampak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
5. Apakah *good governance government* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip budaya organisasi kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh prinsip *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat di bidang teoritis:

- a. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan serta dapat memberikan wawasan bagi peneliti untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai Akuntansi Sektor Publik.
- b. Menjadikan referensi penelitian selanjutnya, berkenaan dengan Akuntansi Sektor Publik khususnya dibidang pemerintahan yang sesuai dengan pembahasan tentang Sistem Pengendalian Internal, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, *Good Governance Government* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Manfaat di bidang praktis:

- a. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pokok pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk dijadikan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik lagi.
- b. Bagi Perguruan Tinggi
Sebagai pengembangan literature akuntansi di bagian sektor publik khususnya dibagian pemerintah daerah untuk dijadikan referensi pendukung penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pembekalan untuk menambah pengetahuan tentang pemerintah daerah.

d. Bagi investor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut.